

**DAMPAK KEBIJAKAN PERUSAHAAN MEMILIH FOKUS  
PEMASARAN BBM JENIS DEXLITE NON SUBSIDI  
DI SPBU 54.613.30 PT.KEDUNGLINGKONG MAKMUR SEJAHTERA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Nama : Dinar Suci Aisah**

**Nim : 3118018**

**PROGRAM STUDI S-1 ADMINISTRASI BISNIS  
FAKULTAS BISNIS DAN BAHASA  
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL 'ULUM  
JOMBANG  
2022**

**DAMPAK KEBIJAKAN PERUSAHAAN MEMILIH FOKUS  
PEMASARAN BBM JENIS DEXLITE NON SUBSIDI  
DI SPBU 54.613.30 PT.KEDUNGLINGKONG MAKMUR SEJAHTERA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis (S1) dan mencapai gelar Sarjana Administrasi Bisnis



**Oleh:**

**Nama : Dinar Suci Aisah**

**Nim : 3118018**

**PROGRAM STUDI S-1 ADMINISTRASI BISNIS  
FAKULTAS BISNIS DAN BAHASA  
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL 'ULUM  
JOMBANG  
2022**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamualaikum, Wr.Wb

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (SI) Sarjana Administrasi Bisnis (S.AB). Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, peneliti dibantu, di dukung, dan dibimbing oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, Dengan rasa bangga dan bahagia peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada : kedua orang tua, beserta pasangan dan saudara-saudara peneliti yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan. Kepada teman-teman saya yang senantiasa memberikan semangat sampai akhirnya peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Dosen Pembimbing, (Bapak Mohammad Imsin, SE., MP), dan (Ibu Abid Datul Mukhoyaroh, S.Sos., M.Si) yang telah memberikan waktu, ilmu, saran, dan bimbingan demi terwujudnya sebuah skripsi yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Teman-teman program studi Administrasi Bisnis angkatan 2018 khusus kelas B yang sudah banyak memberi banyak warna selama berada di bangku perkuliahan. Dan orang spesial peneliti yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi.

Akhir kata, peneliti persembahkan skripsi ini untuk orang yang tersayang dan teristimewa dalam hidup peneliti

Walaikumussalam, Wr.Wb

## **MOTTO**

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

**( Umar bin Khattab )**

HALAMAN PERSETUJUAN

DAMPAK KEBIJAKAN PERUSAHAAN MEMILIH FOKUS  
PEMASARAN BBM JENIS DEXLITE NON SUBSIDI  
DI SPBU 54.613.30 PT. KEDUNGLINGKONG MAKMUR SEJAHTERA

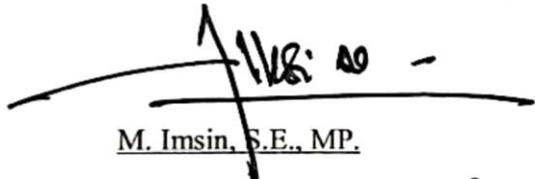
Oleh:

Dinar Suci Aisah

Nim : 3118018

Telah di setujui oleh Dosen Pembimbing :

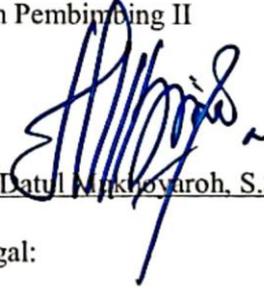
Dosen Pembimbing I



M. Imsin, S.E., MP.

Tanggal: 15-8.22 (FINAL)

Dosen Pembimbing II



Abid Datul Mukhtoyaroh, S.Sos., M.Si

Tanggal:

Mengetahui,

Ketua Program Studi :



Abid Datul Mukhtoyaroh, S.Sos., M.Si

NIPY: 11010614273

HALAMAN PENGESAHAN

DAMPAK KEBIJAKAN PERUSAHAAN MEMILIH FOKUS  
PEMASARAN BBM JENIS DEXLITE NON SUBSIDI  
DI SPBU 54.613.30 PT. KEDUNGLINGKONG MAKMUR SEJAHTERA

SKRIPSI

Oleh:

Dinar Suci Aisah

NIM : 3118018

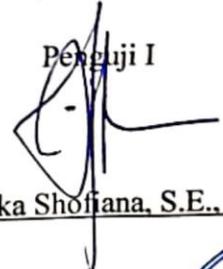
Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2022 Dan dinyatakan lulus.

Majelis Penguji :

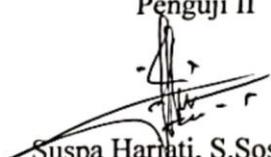
Ketua

  
Abid Datul Mukhlis, S.Sos., M.Si

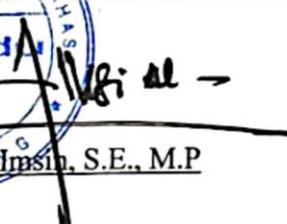
Penguji I

  
Dina Eka Shofiana, S.E., M.A

Penguji II

  
Suspa Hariati, S.Sos., M.M

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Bisnis dan Bahasa

  
M. Insip, S.E., M.P



## PERNYATAAN

Nama : Dinar Suci Aisah

NIM : 3118018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Dampak Kebijakan Perusahaan Memilih Fokus Pemasaran BBM Jenis Dexlite Non Subsidi Di SPBU 54.613.30 PT.Kedunglengkong Makmur Sejahtera” adalah benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya di dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Jombang, 14 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Dinar Suci Aisah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang telah memberikan tauladan baik sehingga akal dan fikiran penyusun mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Dampak Kebijakan Perusahaan Memilih Fokus Pemasaran BBM Jenis Dexlite Non Subsidi Di SPBU 54.613.30 PT.Kedunglengkong Makmur Sejahtera ”** semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dalam menuntut ilmu.

Dengan selesainya penyusunan tugas Skripsi, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Mohammad Imsin, SE., MP. Selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Bahasa, Universitas Tinggi Darul Ulum
2. Ibu Abid Datul Mukhoyaroh, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Bisnis dan Bahasa Universitas Tinggi Darul Ulum Jombang.
3. Bapak Mohammad Imsin, SE., MP. Selaku dosen pembimbing 1 Skripsi.
4. Ibu Abid Datul Mukhoyaroh, S.Sos., M.Si. Selaku dosen pembimbing 2 Skripsi.

5. Seluruh dosen yang mengajar di Fakultas Bisnis dan Bahasa saya ucapkan terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada saya sebagai bekal dimasa yang akan datang.
6. Mama, Papa, serta keluarga tercinta Cece Intan dan Adik Abel yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk penulisan Proposal Skripsi ini.
7. Calon suami saya tercinta Oji Nasrul dan calon adik ipar tercinta saya Nova Yulistari yang memberi support,dan membantu memberi masukan kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat tercinta yang mana telah mendukung,memberi masukan,dan selalu membantu penulis.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi susunan serta cara penulisan skripsi ini, karenanya saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tugas skripsi ini sangat penulis harapkan.

Demikian pengantar dari tugas skripsi ini, semoga bisa bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan juga bagi para penyusun pada khususnya.

Jombang,14 Juni 2022

Penulis

## **6** **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Saat ini kegiatan usaha semakin berkembang, menyebabkan situasi ekonomi yang semakin berwarna karena persaingan yang semakin ketat. Kemajuan ekonomi Negara, mendorong pengembangan bisnis dan mendukung munculnya bisnis baru di bidang jasa dan barang. Akibatnya menciptakan persaingan yang relatif ketat dalam dunia bisnis. Para pelaku bisnis bersaing untuk memenuhi keinginan, kebutuhan, dan harapan konsumen serta kepuasan pelanggan, sehingga pelaku usaha dapat memastikan bahwa pelanggannya tetap loyal meskipun terjadi perubahan.

<sup>7</sup> Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat diperlukan untuk kebutuhan masyarakat baik di negara maju, negara berkembang, ataupun negara miskin. BBM berperan penting karena termasuk kebutuhan pokok bagi kehidupan masyarakat baik di gunakan sebagai kebutuhan rumah tangga maupun untuk usaha. BBM juga sangat penting untuk transportasi. Seperti yang kita ketahui bahan bakar minyak juga memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat maka dengan ini pemerintah ikut campur tangan dalam menentukan harga dan sekaligus juga menjamin ketersediaannya di pasar domestik. Tidak sedikit masyarakat yang masih menggunakan BBM subsidi dari pemerintah karena harga yang lebih murah dari BBM non subsidi, tetapi BBM non subsidi lebih berkualitas dari pada BBM subsidi. Adapun berikut merupakan produk unggulan dari Pertamina, seperti Peralite, Pertamina turbo,

Pertamina Dex, Dexlite, Pertamax, pelumas fastron, serta bright gas (Sawindri, 2018).

BBM merupakan kebutuhan dasar, akan tetapi karena tingginya permintaan dari masyarakat akan kebutuhan bahan bakar minyak jika seperti itu maka dapat menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut, namun kebutuhan yang semakin tinggi terhadap BBM tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan. Karena bahan bakar minyak sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dengan itu Pertamina melakukan strategi pemasaran agar masyarakat dapat beralih ke BBM non subsidi. Karena semakin besarnya daya saing di bidang ritel, dengan itu Pertamina melakukan berbagai strategi pemasaran agar dapat bertahan di pasar dan tidak kalah saing. Yang tentunya agar para konsumen lebih tertarik menggunakan BBM non subsidi daripada BBM bersubsidi (Diana, 2018).

Sementara itu menurut komite BPH Migas Henry Ahmad dan Ibnu Wajar menyampaikan beberapa peraturan penyaluran BBM Subsidi bagi kendaraan bermotor sesuai dengan keputusan Kepala BPH Migas No 4 Tahun 2020, diktum pertama, kendaraan bermotor perseorangan roda 4 paling banyak 60 L/hari/kendaraan, kendaraan bermotor umum angkutan orang/barang roda 4 paling banyak 80 L/hari/kendaraan, kendaraan bermotor umum angkutan orang/barang roda 6 paling banyak 200 L/hari/kendaraan. Diktum kedua Badan usaha pelaksanaan penugasan wajib mencatatkan nomor polisi kendaraan konsumen pengguna transportasi kendaraan bermotor

,angkutan orang atau barang setiap kali melakukan penyaluran BBM, badan usaha pelaksanaan penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran jenis bahan bakar subsidi setiap 3 bulan dan pelaporan setiap akhir. Pada saat peraturan ini ditetapkan<sup>17</sup> badan usaha pelaksanaan penugasan wajib mensosialisasikan peraturan ini kepada penyalur dan masyarakat (CNN : 23 Juli 2020).

Sedangkan bagi bahan bakar non subsidi tidak ada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kecuali penentuan harga BBM, hal ini sangat berbeda dengan peraturan sebelumnya yang ditetapkan pemerintah terhadap bahan bakar umum bersubsidi. Pertamina Persero salah satu bagian dari perusahaan yang mampu bersaing dengan terobosan terbaru meluncurkan beberapa program pengembangan produk BBM baik subsidi maupun non subsidi, yang berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan. Salah satu perkembangan produk BBM pengganti subsidi adalah BBM jenis Dexlite yang kualitasnya tidak kalah dengan bahan bakar bersubsidi. Dexlite adalah varian diesel untuk mobil jenis SUV, mini SUV, VAN, dan MPV dengan teknologi common rail yang ditenagai oleh mesin diesel memiliki kandungan<sup>8</sup> Cetane Number (CN) minimal 51, kandungan sulfur maksimal 50 ppm, kekentalan (*viscosity*) paling sedikit 2 mm<sup>2</sup>/s dan maksimal 4,5 mm<sup>2</sup>/s yang dinilai membuat mesin bertenaga dan lebih ramah lingkungan karena emisi hasil pembakaran yang rendah dari solar, sehingga membuat suara dan getaran mesin kendaraan lebih halus.

Pertamina menghadirkan BBM Dexlite sebagai komitmen untuk memberikan produk BBM Dexlite sebagai bahan bakar diesel berkualitas namun tetap terjangkau untuk melayani kebutuhan bahan bakar masyarakat. Seperti yang saat ini dilakukan Di SPBU 54.613.30 di Mojokerto, 3 tahun beroperasi dibidang layanan dan penyediaan BBM yang bekerja sama dengan Pertamina Persero, menginginkan supaya selalu dapat memberikan layanan serta ketersediaan bahan bakar diesel yang diperlukan konsumen dengan mudah. Dengan demikian diakhir tahun ke 3 tepatnya pada tanggal 30 november 2021, Direktur SPBU 54.613.30 Ibu Habiba Ismail Mattalitti memberikan kebijakan untuk beralih menjual produk BBM diesel non subsidi guna untuk memfokuskan produk yang dimiliki dan meningkatkan kualitas persediaan BBM diesel di SPBU 54.613.30 yang baik serta ramah lingkungan dan mudah didapatkan bagi konsumen (PT.Kedunglengkong Makmur Sejahtera : 30 November 2021).

Akan tetapi BBM Dexlite yang sudah ditetapkan harganya oleh Pertamina dan mengalami perubahan harga selama 3 kali berturut-turut yang awal mulai di tetapkan di bulan Desember 2021 Rp.9500,- di bulan Februari 2021 Rp.12.150,- dan yang terakhir di bulan Maret 2022 sudah mencapai harga Rp.12.950,-.Harga yang berbeda dari BBM subsidi Biosolar sebelumnya dengan selisih perbedaan harga Rp.7.800,- hal tersebut pastinya menjadi masalah baru dan membawa dampak terhadap perusahaan dan masyarakat konsumen.

Dari penjabaran latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui dampak dari kebijakan perusahaan terkait pengalihan penjualan BBM bio-solar subsidi dan fokus ke BBM jenis dexlite non subsidi. Maka peneliti tertarik mengambil judul **“Dampak Kebijakan Perusahaan Memilih Fokus Pemasaran BBM Jenis Dexlite Non Subsidi Di SPBU 54.613.30 PT. Kedunglengkong Makmur Sejahtera”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas,maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur pembuatan kebijakan perusahaan memilih fokus pemasaran BBM jenis dexlite non subsidi di SPBU 54.613.30 Kedunglengkong ?
- b. Bagaimana dampak yang di timbulkan dari kebijakan perusahaan memilih fokus pemasaran BBM jenis dexlite non subsidi di SPBU 54.613.30 Kedunglengkong ?
- c. Evaluasi dampak kebijakan perusahaan memilih fokus pemasaran BBM jenis dexlite non subsidi di SPBU 54.613.30 Kedunglengkong ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk menjelaskan prosedur pembuatan kebijakan perusahaan memilih fokus pemasaran BBM jenis dexlite non subsidi di SPBU 54.613.30 Kedunglengkong .
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisa dampak kebijakan perusahaan memilih fokus pemasaran BBM jenis dexlite non subsidi di SPBU 54.613.30 Kedunglengkong .
- c. Untuk mengevaluasi dampak kebijakan perusahaan memilih fokus pemasaran BBM jenis dexlite non subsidi di SPBU 54.613.30 Kedunglengkong

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi lingkungan akademisi dan penelitian yang tertarik untuk meneliti masalah yang berhubungan dengan bidang Analisis evaluasi kebijakan dan strategi perusahaan.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada pihak-pihak pelaku usaha, khususnya kepada perusahaan PT.Kedunglengkong Makmur Sejahtera dalam hal pembuatan kebijakan dan strategi perusahaan.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Bab I Pendahuluan; pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka; pada bab ini berisi tentang pembahasan teori terdahulu serta uraian penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan penulisan.

Bab III Metode Penelitian; pada bab ini membahas tentang metode penelitian dan ruang lingkup penelitian, penjelasan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian data dan hasil penelitian; pada bab ini membahas tentang penyajian data prosedur pembuatan kebijakan, analisis dampak kebijakan, dan evaluasi kebijakan berdasarkan dampak yang ditimbulkan .

Bab V Kesimpulan dan Saran; pada bab ini membahas kesimpulan hasil penelitian dan saran.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penyusunan penelitian ini, peneliti memerlukan beberapa konsep dari penelitian-penelitian terdahulu dan sebelumnya sudah dipublikasikan. Tujuan untuk pengambilan penelitian terdahulu antara lain dapat dijadikan sebagai acuan dan tumpuan serta perbandingan dalam penelitian saat ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan yang digunakan dan terdapat didalam tabel sebagai berikut :

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Dyah Fivin Hesti A.S (2018)	Analisis Kebijakan Perusahaan Dalam Menentukan Stratei Pemasaran Pada Penerbit PT.Pabelan Di Surakarta	Terdapat pers-maan yakni menggunakan metode kualitatif	Fenomena yang diambil penelitian tersebut menggunakan strategi pemasaran	(1) Strategi pemasaran yang diterapkan dalam perusahaan meliputi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi perumusan strategi dan keunggulan bersaing.
2	Fitri Andriani (2020)	Dampak Kebijakan Perubahan Status Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Di PT.Tanjung Raya PLYWOD	Terdapat persamaan yakni menggunakan metode deskriptif kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap kinerja karyawan terhadap kebijakan	(1)kebijakan perubahan status kerja kontrak bagi karyawan harian mempengaruhi tingkat kerugian peningkatan output kayu lapis. (2)tidak ada banyak perbedaan antara pekerja kontrak dan pekerja

				perusahaan PT.Tanjung Raya PLYWOD	wiraswasta, adanya perbedaan kinerja. (3) tingkat pelanggaran yang relatif sama untuk Peningkatan karyawan Kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan biaya produksi perusahaan, untuk memperbaiki situasi karyawan yang kinerjanya kurang tepat, dengan cara yang dapat dilakukan manajemen, dengan memotivasi karyawan, melatih karyawan serta memberi masukan. anggota dan mengevaluasi pekerjaan mereka. (4) Memberi kompensasi atau dukungan karyawan dan tidak menerima karyawan untuk meninggalkan perusahaan.
3	Dewi Nyoman Juniasa (2020)	Dampak Kebijakan Pembangunan Pariwisata Pantai Terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Perilaku Masyarakat	Terdapat persamaan yakni menggunakan metode kualitatif	Penelitian ini mengkaji dampak pengembangan obyek wisata terjadap aspek sosial, ekonomi dan perilaku	(1) dalam konteks sosial, massa dan ketimpangan sosial muncul di masyarakat. (2) Dalam konteks ekonomi, timbul berbagai jenis transaksi keuangan, seperti transaksi yang

				masyarakat	berdiri sendiri, permodalan lembaga BUMDES, dan perubahan badan usaha. (3) Mengenai perubahan perilaku, telah terjadi perubahan yang signifikan di kalangan pengusaha non-lokal di bidang pendidikan dan kesehatan. .
4	Hari Kusnanto (2019)	Dampak Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Terhadap Kepuasan Pasien Dalam Menerima Pelayanan Kesehatan Puskesmas Di Kota Ambon	Jenis penelitian menggunakan diskriptif dengan pendekatan kualitatif	Penelitian membahas tentang persepsi stakeholder tentang kebijakan pelayanan gratis di puskesmas	(1) Kinerja pegawai negeri sipil pada rezim kepegawaian belum optimal, kinerja pegawai negeri sipil hanya normatif dan tidak menunjukkan efisiensi/hasil. kerja bagus disini menyebabkan tidak didukung dengan penawaran khusus atau kompensasi untuk profesional kesehatan. Penyediaan alokasi khusus wilayah harus didistribusikan secara merata di antara semua profesional perawatan kesehatan. (2) Perlu disiapkan fasilitas

					pendukung untuk kelancaran pelayanan gratis seperti logistik dan perencanaan tata guna lahan.
5	Muhammad Rizal (2021)	Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bagi Pelaku Bisnis Coffe Shop Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kab.Purwakarta	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	Penelitian Ini meneliti dampak kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat pada era pandemic COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah.	(1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha penyangraian kopi dipengaruhi oleh pembatasan aktivitas masyarakat yang terlihat dari konversi perilaku B2B business-to-customer melalui penurunan penjualan, pendistribusian bahan kopi selanjutnya dan peningkatan konversi. pada pemasaran digital.
6	Made Resta Handika (2018)	Strategi Pemasaran Bisnis Kuliner Menggunakan influencer Melalui Media Sosial Instagram	Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder menggunakan desain penelitian kualitatif	Penelitian ini mengembankan bisnisnya dengan menggunakan influencer melalui media sosial sebagai ajang promosi dan pengembangan bisnis.	(1) Berkat kemajuan teknologi, konsumen lebih cenderung menggunakan jejaring sosial Instagram. (2) Menggunakan pemasaran media sosial, khususnya Instagram, dapat mengurangi biaya keuangan pemasaran. (3) Menggunakan influencer untuk lebih

					<p>meningkatkan pemasaran Instagram dan memberikan dampak positif bagi kemajuan The Night Market Café &amp; Co-working Space.</p> <p>(4) Tempat/tempat dalam bauran pemasaran dapat membawa tamu kembali ke The Night Market Café &amp; Co-working Space, karena Night Market Café &amp; Coworking Space menyediakan ruang dan interior yang menarik untuk dinikmati orang, barang habis pakai dan hadiah, dan sekaligus terjangkau. Iaitu, tas konsumen.</p>
7	Rina Oktiyani (2020)	Pengembangan Strategi Pemasaran Ayam Barokah Melalui Digital Marketing	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Penelitian ini bertujuan mengembangkan pemasaran online/digital marketing untuk memberikan kemudahan dalam komunikasi, bertukar	(1) Mengindikasikan penurunan penjualan akibat penurunan permintaan terkait pandemi Covid 19. Untuk mengantisipasi penurunan penjualan seperti biasanya, peternakan unggas Barokah memasarkan

				informasi serta dalam menawarkan produk.	langsung ke masyarakat konsumsi tanpa melalui distributor. (2) Menyesuaikan produk berupa ayam rebus, kemudian menggunakan sistem pemasaran digital, seperti penggunaan media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Instagram, yang dikembangkan bersama dengan halaman web. (3) Mengembangkan strategi pemasaran digital melalui fase segmentasi, penargetan, dan penempatan. (4) Kemudian menggabungkan ketiga elemen bauran pemasaran menjadi satu harga, Produk yang sesuai yang mendukung elemen keempat, yaitu promosi, merupakan inti dari strategi pemasaran digital. (5) Mengembangkan strategi pemasaran digital
--	--	--	--	--	---

					yang mencakup informasi lini produk, harga dan metode pemesanan, penjualan langsung, dan layanan pengiriman.
--	--	--	--	--	--

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian Kebijakan

<sup>9</sup> Kebijakan dapat dibedakan menjadi kebijakan publik dan kebijakan privat. Kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintah yang legitimate untuk mendorong, menghambat, melarang atau mengatur tindakan private (individu atau lembaga swasta). Kebijakan publik memiliki dua ciri pokok. *Pertama*, dibuat atau diproses oleh lembaga pemerintahan atau berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah (Gunn:1988). *Kedua*, bersifat memaksa atau berpengaruh terhadap tindakan privat masyarakat luas (publik). Sebagai contoh, kebijakan harga BBM adalah kebijakan publik karena dibuat oleh pemerintah bersifat memaksa dan dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi penduduk, konsumen maupun pengusaha.

Kebijakan privat adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga swasta dan tidak bersifat memaksa kepada orang atau lembaga lain. Misalnya, keputusan suatu perusahaan swasta untuk

menetapkan harga jual produk yang dihasilkannya merupakan contoh kebijakan privat. Perusahaan swasta adalah lembaga privat dan keputusannya tidak mengikat atau bersifat memaksa bagi perusahaan lain atau masyarakat luas. Kebijakan privat hanya berlaku internal, bagi lembaga atau individu itu saja. Sebagai suatu profesi atau bidang ilmu, obyek liputan analisis kebijakan ialah kebijakan publik. Kebijakan privat tidak termasuk dalam obyek liputan analisis kebijakan. Kebijakan perusahaan, misalnya, merupakan obyek liputan dari profesi atau bidang ilmu manajemen perusahaan.

<sup>1</sup> Kebijakan publik dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Kebijakan-kebijakan publik dapat ditemukan dalam bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, pertanian, perumahan rakyat, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri dan lain sebagainya. Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dan mengapa mereka melakukannya. Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang mampu mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan. (Nugroho, 2004:50)

<sup>1</sup> Pendapat lain dari Carl Friedrich memberikan definisi kebijakan publik “sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu

dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan yang diusulkan tersebut dapat mengatasi dan mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino, 2012:7). Kebijakan publik memiliki tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama guna mencapai tujuan (visi dan misi) yang telah disepakati, dengan kata lain kebijakan publik merupakan jalan untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan (Nugroho, 2004:50).

Menurut Anderson kebijakan publik juga memiliki beberapa sifat, yaitu: (Agustino, 2012:7)

*a. Policy Demand*

Permintaan yang dibuat oleh masyarakat baik secara individu/kelompok kepada pemerintah melalui saluran-saluran yang telah disediakan karena adanya masalah yang mereka rasakan. Permintaan tersebut bisa berupa tuntutan, tekanan atau desakan publik kepada pemerintah.

*b. Policy Decisions*

Putusan yang dibuat oleh pejabat publik dari beberapa alternatif kebijakan yang telah disediakan dan dikaji secara mendalam untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

*c. Policy Statements*

Pernyataan secara formal dari keputusan politik yang telah ditetapkan, yang meliputi ketetapan legislatif, dekrit dan perintah eksekutif, peraturan administratif, pendapat pengadilan, dan lain sebagainya.

*d. Policy Output*

Hasil akhir atau perwujudan nyata dari kebijakan publik di mana pemerintah harus mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

#### e. *Policy Outcomes*

Konsekuensi kebijakan yang diterima oleh masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, berasal dari apa yang dikerjakan maupun tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah usaha atau tindakan, keputusan, dan strategi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat.

### 2.2.2 Prosedur Kebijakan

Menurut Thomas R. Dye, menjelaskan proses-proses kebijakan publik meliputi beberapa hal sebagai berikut: (Dye, 2013:33)

#### 1 a. Identifikasi Masalah Kebijakan (*Identification of Policy Problem*)

Identifikasi masalah dalam kebijakan publik yakni para pembuat kebijakan harus paham dan teliti dalam mengenali dan mendefinisikan permasalahan, sebab hal tersebut merupakan langkah fundamental dan krusial dalam perumusan kebijakan yang baik.

#### 1 b. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda merupakan tahap lanjutan dari identifikasi masalah yang sebelumnya telah dijelaskan. Dalam penyusunan agenda memutuskan hal yang akan menjadi masalah jauh lebih penting daripada membuat solusinya.

#### 1 c. Perumusan kebijakan (*Policy Formulation*)

Perumusan kebijakan adalah pengembangan alternatif kebijakan

untuk menangani masalah pada agenda publik.

<sup>1</sup>  
d. Pengesahan kebijakan (*Legitimizing of Policies*)

Setelah dilakukan perumusan kebijakan yang didalamnya merupakan pilihan dari alternatif-alternatif yang ditawarkan, maka tahap selanjutnya adalah pengesahan kebijakan tersebut. <sup>1</sup> Pengesahan kebijakan ini menjadi tahapan awal dalam pembentukan kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan atau suatu kebijakan telah memiliki (*legal standing*) kedudukan kuat karena telah mendapatkan pengesahan dari para pemegang kewenangan.

e. Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*)

Implementasi melibatkan semua kegiatan yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Kegiatan- kegiatan tersebut diwujudkan melalui sebuah program. <sup>1</sup> Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang digunakan atau dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Karena itu baik tidaknya kebijakan dapat dilihat pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan.

### 2.2.3 Implementasi Kebijakan

<sup>13</sup> Menurut Webster dalam Widodo (2008), diartikan sebagai “to provide the means for carrying out” yang artinya adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu. To give practical effect to, (menimbulkan dampak atau akibat). terhadap sesuatu. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan

dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu.

Konsep implementasi diatas memberi pengertian bahwa implementasi adalah perbuatan melakukan sesuatu yang pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap sesuatu yang merupakan objek dari implementasi itu sendiri. Pengertian ini diperkuat oleh pendapat Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007) tentang definisi implementasi: "Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output) " Implementasi kebijakan jika dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undangan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas-aktivitas untuk melakukan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan.

10

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 195) menjelaskan bahwa: "Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada

masyarakat atau kejadian-kejadian.” Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008: 196) menjelaskan bahwa: “Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Berdasarkan rumusan implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan diatas, maka implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak/akibat bagi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program.

Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008: 196) mengatakan bahwa: “Implementasi kebijakan sebagai tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi kebijakan diartikan sebagai pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersamasama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin

diupayakan oleh kebijakan tersebut.” Menurut Bressman dan Wildansky dalam Agustino (2008: 198) menyatakan bahwa: “Implementasi kebijakan adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan. Implementasi kebijakan merupakan proses lanjutan dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan-tujuan kebijakan sedangkan pada tahap implementasi kebijakan, tindakan (action) diselenggarakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.”

#### 2.2.4 <sup>12</sup> Analisis Kebijakan

Ada beberapa model analisis kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn (2003: 117-124) yaitu sebagai berikut :

- a. Model Prospektif yaitu bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi- konsekuensi kebijakan ‘sebelum’ suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif, karena seringkali melibatkan Teknik-teknik peramalan (forecasting) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan.
- b. Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan ‘setelah’ suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.

- c. Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini sering disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik 'sebelum' maupun 'sesudah' suatu kebijakan dioperasikan. Model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan teknik-teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

## 2.3 Program Kebijakan

### 2.3.1 Fokus Strategi

5 Strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi jenis ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan dalam pengambilan keputusannya untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Dalam pelaksanaannya – terutama pada perusahaan skala menengah dan besar –, strategi fokus diintegrasikan dengan salah satu dari dua strategi generik lainnya: strategi biaya rendah atau strategi pembedaan karakteristik produk. Strategi ini biasa digunakan oleh pemasok “niche market” (segmen khusus/khas dalam suatu pasar tertentu; disebut pula sebagai ceruk pasar) untuk memenuhi kebutuhan suatu produk barang dan jasa khusus.

Syarat bagi penerapan strategi ini adalah adanya besaran pasar yang cukup (market size), terdapat potensi pertumbuhan yang baik, dan tidak terlalu diperhatikan oleh pesaing dalam rangka mencapai

keberhasilannya (pesaing tidak tertarik untuk bergerak pada ceruk tersebut). Strategi ini akan menjadi lebih efektif jika konsumen membutuhkan suatu kekhasan tertentu yang tidak diminati oleh perusahaan pesaing. Biasanya perusahaan yang bergerak dengan strategi ini lebih berkonsentrasi pada suatu kelompok pasar tertentu (niche market), wilayah geografis tertentu, atau produk barang atau jasa tertentu dengan kemampuan memenuhi kebutuhan konsumen secara baik, excellent delivery. (Porter, 1980 dan 1985).

Pada Strategi ini perusahaan memusatkan usahanya untuk melayani sebagian kecil segmen pasar dan tidak melayani pasar secara luas. Usaha ini dilakukan dengan mengenali secara detail pasar yang dituju dan menerapkan keunggulan biaya menyeluruh atau diferensiasi pada segmen kecil tersebut. Sesuai dengan namanya, focus berarti menasar kelompok konsumen yang lebih sempit atau dalam pemasaran lazim dikenal dengan istilah ceruk pasar. Ceruk pasar adalah kelompok konsumen yang memiliki kombinasi kebutuhan atau sumber daya yang lebih spesifik. Misalnya, konsumen yang suka manis tetapi menderita diabetes. Strategi ini cocok diterapkan jika :

- a. Kebutuhan pembeli terhadap suatu barang bermacam-macam
- b. Tidak ada saingan khusus dalam target/segmen yang sama
- c. Segmen pembeli sangat berbeda dalam ukuran, pertumbuhan, profitabilitas, yang membuat banyak segmen lebih menarik daripada yang lain
- d. Perusahaan kurang memiliki kapabilitas untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan pasar

Strategi focus adalah strategi yang mengkonsentrasikan perhatian pada bagian sempit atau segmen atau ceruk dari keseluruhan pasar. Segmen sasaran atau ceruk dapat didefinisikan oleh keunikan geografis, kebutuhan-kebutuhan khusus dalam penggunaan produk atau oleh atribut-atribut khusus dari produk yang menarik untuk anggota ceruk tertentu.

Ciri-ciri	<i>Focused Low-Cost and Focused Differentiation</i>
Basis dari keunggulan kompetitif	Biaya lebih rendah dalam melayani ceruk ( <i>focused low-cost</i> ) atau kemampuan menawarkan pembeli ceruk sesuatu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan selera ( <i>focused differentiation</i> )
Target strategi	Ceruk pasar sempit dimana kebutuhan dan preferensi pembeli berbeda dari sisa pasar lainnya.
Lini Produk	Diskotomisasi supaya sesuai dengan kebutuhan khusus dari segmen pasar.
Penekanan Produksi	Dibuat khusus untuk ceruk tertentu.
Penekanan Pemasaran	Mengkomunikasikan kemampuan unik produk untuk memuaskan kebutuhan khusus dari pembeli.
Mempertahankan Strategi	Tetap secara penuh melayani ceruk lebih baik dari pesaing-pesaingnya.

Pemasaran relung telah digunakan secara sinonim dengan segmentasi pasar (market segmentation), pemasaran target (target marketing), pemasaran mikro (micro marketing), pemasaran regional (regional marketing), pemasaran fokus (focused marketing), dan pemasaran terkonsentrasi (concentrated marketing). (Parish, Cassill, Oxenham, 2005: 698). Pada dasarnya, pemasaran fokus berkenaan kepada persaingan dalam segmen pasar yang didefinisikan secara sempit dengan sesuatu yang ditawarkan itu adalah khusus. Pada

intinya, perusahaan pemasar fokus menjadi "ikan besar di kolam yang kecil". Keunggulan bersaing perusahaan dapat berasal dari keahlian (menjadi spesialis) dan memiliki pangsa pasar yang besar dari segmen pasar yang relatif kecil. Akibatnya, banyak pesaing potensial tidak menganggap layak untuk secara langsung bersaing dengan pemasar fokus. Kebanyakan usaha kecil umumnya bukanlah pemasar fokus, mereka hanya memiliki pangsa yang kecil dari segmen pasar yang besar sedangkan pemasar fokus memiliki pangsa pasar yang besar di segmen pasar yang kecil.

## 2.4 Evaluasi Kebijakan

### 2.4.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan

<sup>1</sup> Evaluasi diperlukan dalam sebuah kebijakan program untuk mengungkapkan apakah hasil yang diharapkan dari adanya program tersebut sudah tercapai dan telah sesuai dengan sasaran serta dapat mengukur seberapa besar manfaat yang telah dihasilkan. Definisi evaluasi secara umum dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), yakni untuk menganalisis hasil kebijakan dengan menggunakan satuan nilai. Sedangkan untuk artian yang lebih spesifik, evaluasi berhubungan dengan proses memproduksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan (Dunn, 2003:608)

<sup>1</sup> Definisi lain dari evaluasi yaitu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan sebagai suatu kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, namun dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program- program yang dibuat untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu cara atau usaha<sup>1</sup> untuk menentukan dampak atau konsekuensi yang sebenarnya dari kebijakan di dalam kondisi kehidupan nyata (Winarno, 2013:23).

<sup>1</sup> Proses dalam evaluasi berimplikasi pada penekanan dengan melihat bagaimana hasil atau keluaran itu dihasilkan daripada hanya melihat hasilnya semata. Dalam menjalankan proses evaluasi harus berkembang, deksriptif, berkesinambungan, luwes dan induktif (Patton, 2009:31).<sup>1</sup> Evaluasi perlu dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik mencapai hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi kebijakan publik gagal mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan penelitian evaluasi kebijakan yaitu mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan, mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran apakah telah mencapai dampak yang diinginkan, dan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu program kebijakan.

<sup>2</sup> Evaluasi merupakan tahap akhir di dalam proses kebijakan. Lester dan Stewart (2000) menyatakan evaluasi kebijakan pada

hakekatnya mempelajari konsekuensi-konsekuensi kebijakan. Evaluasi kebijakan sebagai suatu aktivitas fungsional telah dilakukan sejak lama, sejak kebijakan publik mulai dikenal. Anderson (1979), berpendapat bahwa evaluasi kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap implementasi (proses), dan akibat-akibat (dampak) kebijakan.<sup>16</sup>

Mengapa Evaluasi kebijakan dilakukan, karena pada dasarnya setiap kebijakan mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. Mengutip pendapat Hogwood dan Gunn ( 1988), dijelaskan bahwa penyebab dari kegagalan suatu kebijakan ( policy failure ) dapat dibagi menjadi 2 katagori yaitu : ( 1 ) karena “non implementation (tidak terimplementasi, dan ( 2 ) karena “unsuccessful” (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikannya suatu kebijakan itu berarti bahwa kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi bila suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sudah sesuai rencana, dengan mengingat kondisi eksternal ternyata sangat tidak menguntungkan, maka kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang telah dikehendaki.

<sup>1</sup> Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan <sup>1</sup> menilai manfaat dari program-program kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan dengan membandingkan hasil dampak yang telah diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## 2.4.2 Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki empat fungsi dalam memenuhi akuntabilitas publik, yaitu: (Wibawa, 1994:10)

- a. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat memotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realita yang diamati. Evaluasi ini mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
- b. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut. Misalnya seberapa jauh program yang dimaksud mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, adakah dampak yang ditimbulkan telah sesuai dengan yang diharapkan, adakah dampak yang tak diharapkan.

## 2.4.3 Kriteria Evaluasi

Kriteria merupakan karakteristik program yang dianggap sebagai basis relevan dan penting untuk melakukan riset evaluasi. Terdapat kriteria dalam evaluasi, antara lain: (Dunn, 2003:610)

- a. <sup>1</sup> Keefektifan (*Effectiveness*). Kriteria ini berkaitan dengan apakah suatu program atau kebijakan mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan.
- b. <sup>2</sup> Efisien (*Efficiency*). Kriteria ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil atau tujuan program kebijakan yang diinginkan.
- c. Kecukupan (*Adequacy*). Kriteria ini berhubungan dengan pertanyaan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas program dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan pihak yang terlibat dalam program untuk memecahkan suatu masalah.
- d. Kesamaan/pemerataan (*Equity*). Kriteria kesamaan atau pemerataan menunjuk pada kemampuan program dalam menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda.
- e. Responsivitas (*Responsiveness*). Kriteria ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh hasil suatu program dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- f. Kelayakan/ketepatan (*Appropriateness*). Kriteria ini <sup>1</sup> digunakan untuk memastikan bahwa hasil atau tujuan dari program tersebut benar-benar berguna dan dapat memberikan nilai untuk kelompok sasarannya.

#### 2.4.4 Jenis Evaluasi

<sup>1</sup> Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Wibawa menjelaskan

ada 4 jenis evaluasi, yaitu: (Wibawa, 1994:74-75)

- 1 a. Single Programme After Only. Program tunggal setelah dilaksanakan yaitu evaluator hanya mendapatkan data atau keadaan kelompok sasaran program pada waktu program telah selesai. Sehingga analisis tidak mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program.
- b. Single Programme Before After. Program tunggal sebelum dan sesudah dilaksanakan yaitu memiliki data lebih lengkap mengenai sasaran program pada waktu sebelum dan sesudah program berlaku. Selain itu adanya perubahan pada kelompok sasaran saat sebelum dan sesudah program dilaksanakan.
- c. Comparative After Only. Perbandingan dua kelompok sesudah program dilaksanakan yaitu mengetahui keadaan kelompok sasaran dan kelompok kontrol sesudah program.
- d. Comparative Before After. Perbandingan dua kelompok sebelum dan sesudah program dilaksanakan yaitu mengetahui dampak program terhadap kelompok sasaran dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah program dilaksanakan.

1 Dari berbagai pendapat para ahli di atas dalam penelitian ini menggunakan teori Finsterbusch dan Motz yang membagi evaluasi menjadi empat jenis yaitu evaluasi single programme after only, single programme before after, comparative after only dan comparative before after. Dari empat jenis evaluasi tersebut, peneliti menggunakan evaluasi

single program before-after, yaitu dengan melihat perubahan yang terjadi pada kelompok konsumen sebelum dan sesudah pelaksanaan program focus pemasaran BBM dextrite non subsidi dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan menggunakan data periode tertentu dalam kebijakan program untuk melihat dampak perubahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan program kebijakan tersebut.

#### <sup>1</sup> 2.4.5 Desain Evaluasi

Terdapat 6 desain evaluasi kebijakan menurut Carl V. Patton, David Sawicki, dan Jennifer J. Clark, yaitu: (Jennifer, 2016:352-359)

- <sup>1</sup> a. Before and after comparisons (perbandingan antara sebelum dan sesudah). Karakteristik dari pendekatan jenis ini hanya berlaku untuk satu komunitas yang sama dengan membandingkan kondisi (masyarakat atau lokasi) sebelum dan sesudah adanya intervensi. Asumsi dari desain ini yaitu bahwa ada perbedaan antara data yang dikumpulkan sebelum implementasi dan setelah implementasi kebijakan atau program.
- b. With and without comparisons (perbandingan antara dengan atau tanpa intervensi). Karakteristik dari pendekatan jenis ini hanya berlaku untuk lebih dari satu komunitas dengan membandingkan antara komunitas yang diberi intervensi dengan komunitas yang tidak diberi intervensi dalam waktu yang bersamaan. Asumsi yang tepat yaitu bahwa perubahan yang terjadi di dua lokasi berhubungan dengan kebijakan atau program.

c. Actual vs planned performance comparisons (perbandingan antara kenyataan dengan rencana). Karakteristik dari pendekatan jenis ini membandingkan antara rencana (sebelum pelaksanaan program) dengan kenyataan (setelah program) yang ada di lapangan (sesuai atau tidak). Evaluator menetapkan tujuan spesifik dan target untuk kriteria evaluasi yang ditentukan sebelumnya untuk periode waktu yang diketahui, dan memperoleh data tentang kinerja yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, evaluator membandingkan kinerja yang sebenarnya dengan kinerja target, dan mencari penjelasan yang masuk akal untuk perbedaan yang mungkin disebabkan oleh faktor program dan non program.

d. Experimental (controlled) models. Karakteristik dari pendekatan jenis ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkontrol atau dikendalikan untuk mengetahui kondisi yang diteliti. Desain eksperimental ini biasanya membuat perbandingan antara individu dalam kelompok yang dipilih secara acak, beberapa di antaranya dilayani oleh program dan beberapa yang tidak dilayani atau dilayani dengan cara lain. Kelompok perbandingan harus ditentukan sebelum pelaksanaan program, dan kelompok dibuat serupa melalui pemilihan dan penugasan acak.

e. Quasi experimental (uncontrolled) models. Karakteristik dari pendekatan ini berguna untuk evaluasi ketika eksperimen tidak dapat dilakukan, ketika tidak dapat memilih orang atau kelompok yang

mendapat perlakuan dan dikontrol, ketika tidak dapat mengontrol administrasi program atau kebijakan atau membatasi kebijakan untuk kelompok perlakuan atau ketika program tidak ditujukan pada individu.

- f. Cost oriented approach (efisiensi penggunaan dana). Cost oriented approach terbagi menjadi tiga yaitu ex-ante evaluation (evaluasi yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan), on-going evaluation (evaluasi yang dilakukan saat kegiatan sedang berjalan), dan ex-post evaluation (evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan selesai). Desain evaluasi yang berorientasi pada biaya, pendekatan ini menilai kebijakan atau program dengan cara membandingkan biaya yang terpakai untuk sumber daya dengan kriteria tertentu.

Pada penelitian ini menggunakan desain evaluasi yang dikemukakan oleh Patton, Sawaciki dan Jennifer yaitu before vs after comparison dengan melihat perubahan yang terjadi pada kelompok konsumen sebelum dan sesudah adanya program fokus pemasaran BBM dextrite non subsidi dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

## 2.5 Dampak Kebijakan

### 2.5.1 Dampak Kebijakan

Sebagai aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan dilakukan dalam keseluruhan tahap-tahap bukan hanya pada tahap akhir saja. Evaluasi dampak kebijakan merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan seorang evaluator di dalam evaluasi kebijakan. Evaluasi

dampak lebih berfokus pada output dan dampaknya dibandingkan pada prosesnya. Dampak adalah perubahan kondisi baik fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Akibat yang dimaksud adalah baik akibat yang mampu menimbulkan pola perilaku baru kelompok sasaran (impacts) maupun akibat yang tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (effects).

<sup>1</sup> Dampak merupakan akibat dari perubahan yang terjadi setelah adanya pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Perubahan tersebut dapat terjadi baik dilingkungan internal maupun lingkungan eksternal, baik yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki, dan sejauh mana akibat tersebut dapat menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (impact). Dalam kebijakan terdapat dua jenis akibat yang dihasilkan yakni keluaran (output) dan dampak (impact). Keluaran kebijakan seperti barang, layanan, atau sumberdaya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (beneficiaries), sedangkan dampak (impact) kebijakan seperti perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan (Dunn, 2003:358)

<sup>1</sup> Output adalah produk atau hasil langsung dari kegiatan program (H.A.S Moenir, 2001:180). <sup>1</sup> Sedangkan outcome adalah manfaat yang diterima oleh sasaran program selama atau setelah keterlibatan mereka dengan program. Sedangkan impact atau dampak merupakan efek jangka panjang manfaat yang diterima oleh sasaran program. Dampak program berhubungan dengan pengetahuan, keahlian, perilaku atau

sikap, nilai, kondisi, dan status. Dampak merupakan akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan yang diimplementasikan (A.G Subarsono, 2012:122).

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti akan menghasilkan dampak, baik dampak positif yaitu dampak yang diharapkan maupun dampak negatif yaitu dampak yang tidak diharapkan. Hal yang harus diperhatikan dalam memantau dampak suatu kebijakan yaitu kelompok sasaran (target groups) yang terdiri atas individu, masyarakat atau organisasi yang dipengaruhi oleh program kebijakan. Selain itu juga diperhatikan kelompok penerima manfaat atau nilai dari program kebijakan tersebut. Analisis dampak kebijakan penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mempengaruhi dan merubah kelompok sasaran.

Definisi lain dari pengertian dampak yaitu sebagai akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak diharapkan dan apakah akibat tersebut tidak mampu atau mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok (Triana, 2011:278). Dari beberapa definisi tentang dampak dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dampak adalah perubahan yang dihasilkan dari adanya suatu program atau kebijakan yang diimplementasikan kepada kelompok sasaran dalam jangka pendek maupun jangka panjang baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

### 2.5.2 Dimensi Dampak Kebijakan

<sup>1</sup> Dampak (impact) juga dapat diartikan sebagai akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan. Jika tujuan suatu program sudah tercapai, maka diharapkan kebijakan atau program tersebut dapat membawa dampak atau perubahan bagi masyarakat dalam jangka panjang. Dampak yang dimaksud adalah perubahan yang signifikan atau positif yang terjadi setelah adanya program atau kebijakan (Subarsono, 2012:122). <sup>1</sup> Setiap program kebijakan pasti menghasilkan dampak, berikut adalah jenis dampak:

- a. **Dampak Lingkungan.** Lingkungan merupakan semua kegiatan aktivitas manusia yang dapat terjadi didalam ruangan dan luar ruangan. Lingkungan dapat terbagi menjadi dua yaitu komponen biotik (komponen makhluk hidup, misalkan binatang, tumbuh-tumbuhan dan mikroba) dan komponen abiotik (komponen benda mati, misalkan air, udara, tanah, dan energi). Dampak lingkungan merupakan dampak yang dapat dilihat dari adanya perubahan kondisi lingkungan disekitar masyarakat. Kondisi lingkungan yang baik akan membawa perubahan yang baik juga dalam kelangsungan hidup masyarakat sehari-hari.
- b. **Dampak Ekonomi.** Dampak ekonomi dapat bersifat langsung (direct), tidak langsung (indirect impact) dan lanjutan. Dampak ekonomi langsung dapat berupa bantuan dana atau permodalan dari

perusahaan untuk masyarakat, dampak tidak langsung dapat berupa aktivitas ekonomi lokal dari suatu pembelanjaan unit usaha sedangkan untuk dampak lanjutan dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi lokal lanjutan dari tambahan pendapatan masyarakat lokal.

- 1
- c. Dampak Sosial. Dampak sosial dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang menimbulkan kerjasama ataupun perselisihan yang menunjukkan keseimbangan dalam interaksi sosial. Interaksi sosial dibedakan menjadi dua bentuk yaitu asosiatif yang mengarah pada bentuk penyatuan seperti kerjasama, akomodasi, akulturasi, asimilasi dan bentuk disosiatif yang mengarah pada pemisahan seperti persaingan, kontravensi, dan konflik. Dampak sosial merupakan perubahan yang terjadi pada hubungan atau interaksi antar individu setelah adanya suatu peristiwa (program).

- 2

Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara “policy impact / outcome dan policy output. “Policy Impact / outcome” adalah akibat-akibat dan konsekuensi konsekuensi yang ditimbulkan “Policy output” ialah dari apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya program proses perumusan kebijakan pemerintah ( Islamy, 2007 : 114-115).

Dampak kebijakan disini tidak lain adalah seluruh dari dampak pada kondisi “dunia -nyata” ( the impact of a policy is all its effect on real – world conditions ),

sedangkan menurut ( Dye, 2013: 367 ) yang termasuk dampak kebijakan adalah :

- a. Dampak pada masalah public (pada kelompok sasaran) yang diharapkan atau tidak
- b. Dampak pada kelompok diluar sasaran sering juga disebut eksternalitas / dampak melimpah (spillover effects)
- c. Dampak sekarang dan yg akan datang
- d. Dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program
- e. Dampak tak langsung (yang dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan )

<sup>2</sup> Sementara menurut Langbein dalam Wibawa (1994:38), dimensi dampak disoroti oleh:

- a. Waktu Dimensi ini merupakan dimensi yang penting terkait dengan kebijakan yang memberikan dampak sekarang dan yang akan datang.
- b. Selisih antara dampak aktual dengan yang diharapkan Evaluator perlu memperhatikan dampak-dampak yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan yang diharapkan
- c. Tingkat agregasi dampak Dampak yang dirasakan secara individual akan dapat mempengaruhi pada perubahan di masyarakat secara keseluruhan

Tipe dampak, yaitu :

- a. Dampak pada kehidupan ekonomi.
- b. Dampak pada proses pembuatan kebijakan.

- 2
- c. Dampak pada sikap public
  - d. Dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat yang bersifat non ekonomis.

Evaluasi Dampak Menurut Samodra Wibawa Di dalam evaluasi juga terdapat unit sosial yang dapat terkena dampak kebijakan (Wibawa, 1994 : 53-59), antara lain :

- a. Dampak individual, dampak terhadap individu ini dapat menyentuh aspek-aspek antara lain dampak psikis, dampak lingkungan, dampak ekonomi, dampak sosial dan personal.
- b. Dampak organisasional, dampak dari suatu kebijakan dapat dirasakan oleh suatu organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dapat berupa terganggu atau terbantunya pencapaian tujuan organisasi atau kelompok. Sementara itu, suatu kebijakan juga dapat menimbulkan dampak tak langsung terhadap sebuah organisasi atau kelompok, misalnya melalui peningkatan semangat kerja dan kedisiplinan dari anggota organisasi atau kelompok itu sendiri.
- c. Dampak pada masyarakat, dampak terhadap masyarakat oleh sebuah kebijakan menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya, karena masyarakat merupakan suatu unit yang melayani para anggotanya.

d. Dampak pada lembaga dan sistem sosial. Terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan pedoman dasar untuk melihat apakah suatu sistem sosial tersebut lemah atau tidak, yaitu : (1) kelebihan beban; (2) distribusi tidak merata; (3) persediaan sumber daya yang dianggap kurang; (4) adaptasi yang lemah; (5) koordinasi yang jelek; (6) turunnya legitimasi; (7) turunnya kepercayaan; (8) tertutupnya mekanisme koreksi dan adaptasi, diganti dengan sistem kuota. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tentang dampak yang diharapkan dan yang tidak diharapkan yang mencakup dampak individual, dampak organisasional, dan dampak terhadap lembaga dan sistem sosial.

<sup>1</sup> Pembangunan berkelanjutan mencakup isu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Paradigma ini dikenal dengan istilah triple bottom line yang kemudian menjadi paradigma baru dalam tanggung jawab sosial perusahaan. John Elkington merumuskan triple bottom line atau yang biasa disingkat dengan (TBL). Tiga fokus utama perusahaan dalam beroperasi yakni: sosial (masyarakat), ekonomi (keuntungan), dan lingkungan atau biasa disebut dengan profit, planet, and people (3P).<sup>1</sup> Ketiga hal ini saling membutuhkan dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat bergantung pada ekonomi, disamping itu masyarakat juga bergantung pada lingkungan, dan ekonomi bergantung

pada masyarakat dan lingkungan, bahkan ekosistem global. Berikut penjabaran singkat dari konsep Triple Bottom Line: (Wahyudi:2008)

a. Profit atau keuntungan. Perusahaan tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomis yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. Dengan adanya keuntungan secara ekonomi maka akan menarik investor untuk menanamkan modal usaha di suatu daerah. Selain itu, ketika perusahaan mengimplementasikan kebijakan, sudut pandang ekonomi berubah menjadi fokus kajian untuk membangun ketahanan ekonomi bagi masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.

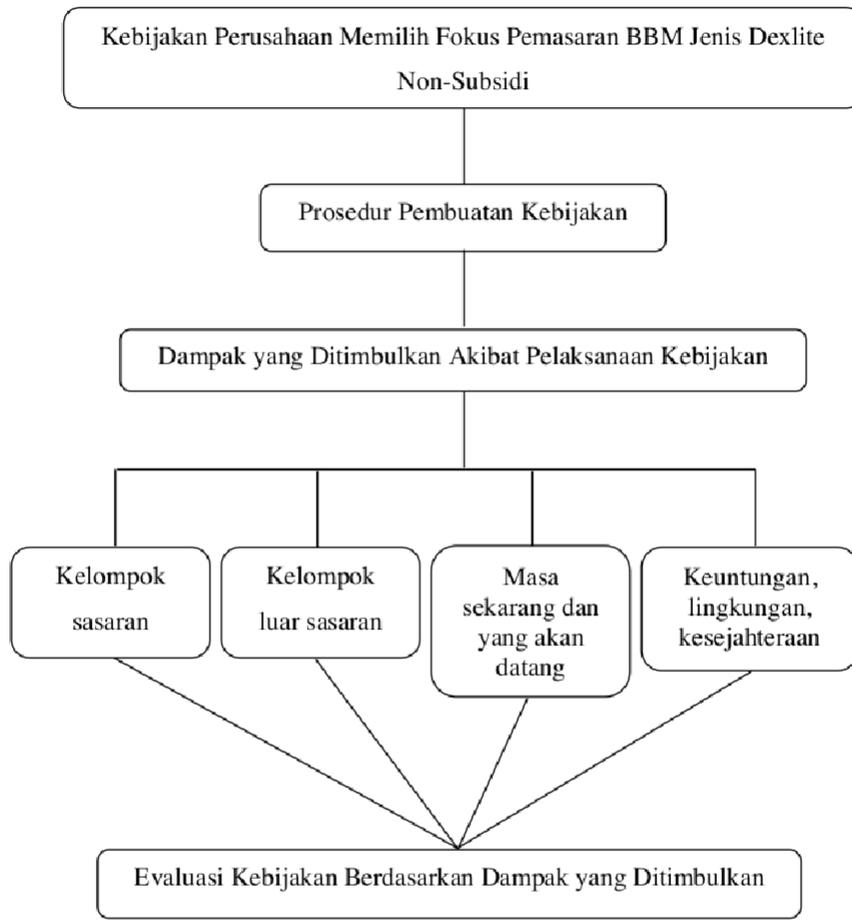
b. Planet atau lingkungan. Perusahaan harus peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati sekitar perusahaan. Beberapa program kebijakan yang menerapkan prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, membangun sarana air bersih, dan lebih mengarah pada perbaikan dan pemeliharaan lingkungan dan alam. Lingkungan yang baik dan memadai juga akan menjadi faktor penting untuk keberlanjutan dan keberhasilan dari perusahaan tersebut.

c. People. Perusahaan harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kesejahteraan manusia, khususnya karyawan dan masyarakat sekitar

<sup>1</sup> Keselarasan triple bottom line merupakan suatu upaya yang sungguh-sungguh dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan

dengan konsisten demi mendorongnya keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai stakeholder seperti perusahaan, pemerintah dan tentunya masyarakat sekitar. Dalam kegiatan bisnis perusahaan sangat penting menekankan pendekatan sukarela terhadap penggabungan aspek sosial dan harapan stakeholders yang akan berdampak pada perusahaan yang terdiri dari pemegang saham, karyawan, pemasok, pelanggan, masyarakat lokal, dan manajemen (Freeman, 2005:253-264). Dampak Kebijakan yang digunakan oleh peneliti adalah teori dampak kebijakan dari Thomas Dye , dan John Engkilton.

## 2.6 Kerangka Konseptual



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di SPBU 54.613.30 Kedunglengkong terletak di Dusun Banjarsari, Desa Kedunglengkong, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada 25 november 2022 – 04 januari 2022.

### 3.3. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:19) Objek Penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal yang objektif, valid dan reliable tentang suatu variabel tertentu. Data penelitian yang dilakukan, objek penelitian yang diteliti yaitu dampak kebijakan perusahaan memilih fokus pemasaran BBM jenis dexlite non-subsidi. Sedangkan yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini adalah SPBU 54.613.30 Kedunglengkong terletak di Dusun Banjarsari, Desa Kedunglengkong, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto.

### 3.4. Jenis Data Penelitian

Jenis data penelitian yang digunakan adalah jenis data primer dan jenis data sekunder.

#### 3.4.1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016:137). Dalam penelitian ini diperoleh data yang diamati secara langsung di SPBU 54.613.30 Kedunglengkong adalah hasil data yang diambil dengan cara wawancara kepada informan yaitu kepada manager SPBU, pengawas SPBU, staff administrasi, operator pos pengisian dexlite dan para konsumen atau pembeli dexlite non-subsidi.

#### 3.4.2. Data Sekunder

Pengertian dari Data sekunder menurut Sugiyono (2016:137) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul

data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data ini diperoleh secara tidak langsung melalui media, dan keterangan lain yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan, seperti informasi mengenai prosedur pembuatan, referensi mengenai dampak, dan evaluasi dampak kebijakan pada SPBU 54.613.30 Kedunglengkong. Didukung dengan studi pustaka yang berhubungan dengan teori dampak dan evaluasi kebijakan. Sedangkan data yang diperoleh dari arsip atau dokumen - dokumen yang dimiliki SPBU 54.613.30 Kedunglengkong : 1. Profil usaha 2. Data volume penjualan dan pendapatan .

### 3.5. Teknik Penentuan Informan

Keberadaan informan sangat penting dalam penelitian untuk mendapatkan informasi dan data mengenai obyek yang diteliti. Informan merupakan orang-orang yang menjadi salah satu sumber data yang diharapkan mengetahui tentang hal-hal yang bersangkutan dengan fokus permasalahan penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu memilih dengan sengaja dan penuh dengan perencanaan para informan yang dapat membantu peneliti memahami masalah yang diteliti.<sup>115</sup>

Untuk mendapatkan informasi yang baik dan terpercaya, peneliti harus menentukan informan awal atau informan kunci. Informan kunci adalah orang yang sangat berpengetahuan dan bisa menyampaikan gagasan, orang yang pandangannya dapat menambah berguna dalam membantu pengamat memahami apa yang sedang terjadi. Adapun yang menjadi *key*

informan dalam penelitian ini antara lain:

1. *Manager* SPBU 54.613.30 Kedunglengkong yaitu Ibu Habiba Ismail Matalitti
2. *Pengawas* SPBU 54.613.30 Kedunglengkong yaitu Muhammad Efendi
3. *Staff Administrasi* SPBU 54.613.30 Kedunglengkong yaitu Ibu Risna Susanti
4. *Operator* Pos pengisian dexlite TBBM SPBU 54.613.30 Kedunglengkong yaitu Ryan Kharisma Nugroho dan Vita Violita Novitasari
5. Kelompok sasaran kebijakan pengguna mobil *Pajero Sport* dan *Ayla*
6. Kelompok diluar sasaran kebijakan sopir *Truk Ayam* dan *Forklip*

### 3.6. Prosedur dan Sumber Pengambilan <sup>3</sup>Data.

Teknik perolehan data dalam penelitian ini mengunkaan teknik milik Sugiyono (2016:225) yang terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan.

#### 3.6.1. Wawancara

Menurut Sugiyono, (2016:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pendekatan wawancara <sup>1</sup> yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*depth interview*) dimana peneliti memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian melalui dialog yang bersifat terbuka dan tidak terstruktur agar informan dapat memberikan informasi sesuai dengan pandangan, pengetahuan, dan pengalamannya tentang fenomena kebijakan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. <sup>1</sup> Agar memudahkan penelitian di lapangan, peneliti terlebih

dahulu membuat sebuah pedoman wawancara (*interview guide*) sehingga wawancara yang dilakukan dapat lebih terarah. Pedoman wawancara yang dimaksud yaitu garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan kepada informan. Sehingga pedoman wawancara ini menyajikan kerangka kerja yang kemudian dikembangkan oleh peneliti. Data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara garis besar antara lain;

- a. Prosedur pembuatan kebijakan perusahaan memilih fokus pemasaran BBM jenis dexlite non-subsidi di SPBU 54.613.30 kedunglengkong.
- b. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan perusahaan memilih fokus pemasaran BBM jenis dexlite non-subsidi di SPBU 54.613.30 kedunglengkong.

3.6.2. <sup>33</sup> Observasi Menurut Sugiyono, (2016:145) Observasi merupakan teknik

pengolahan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Pada konteks penelitian ini, data atau informasi yang dikumpulkan melalui observasi langsung adalah informasi yang mendalam mengenai dampak perubahan sebelum dan sesudah adanya kebijakan perusahaan memilih fokus pemasaran BBM jenis dexlite non-subsidi di SPBU 54.613.30 kedunglengkong, ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Observasi yang dilakukan berdasarkan pada pedoman yang telah ditentukan sebelumnya, yakni:

- a. Pelaksanaan kegiatan kebijakan
- b. Pengamatan terhadap kelompok sasaran kebijakan

- c. Pengamatan terhadap kelompok diluar sasaran kebijakan
- d. Pengamatan tentang ketersediaan BBM jenis diesel
- e. Pengamatan tentang volume pembeli/ konsumen
- f. Pengamatan dan analisis data volume penjualan dan pendapatan sebelum dan sesudah kebijakan

<sup>3</sup> 3.6.3. Dokumentasi Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya – karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainya. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. <sup>1</sup> Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan dan mencatat data yang berupa dokumen dan foto, adapun dokumen dan foto yang <sup>1</sup> dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Dokumen identitas perusahaan
- b. Dokumen volume penjualan dan pendapatan BBM bio-solar dan dexlite
- c. Foto SPBU dan pos pengisian dexlite
- d. Foto wawancara dengan informan
- e. Foto konsumen/ pembeli

### 3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Seorang peneliti harus melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat agar menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Pada penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi Menurut Sugiyono (2016:241) diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu macam triangulasi yaitu triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2016:241) triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda – beda dengan teknik yang sama. Data dikatakan absah apabila terdapat konsistensi atau kesesuaian antara informasi yang diberikan oleh informan satu dengan informan lainnya. Triangulasi sumber yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan dan melakukan pemeriksaan ulang atas data-data yang terkumpul melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara mendalam di lapangan. Dalam proses ini peneliti membandingkan apa yang telah diamati oleh panca indera peneliti tentang kondisi yang terjadi pada lokasi penelitian kaitannya dengan fokus permasalahan penelitian dengan apa

yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan.

b. Membandingkan data hasil wawancara mendalam dari berbagai informan yang berbeda. Informasi yang diperoleh dari satu informan yang telah ditentukan akan dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari informan lainnya mengenai topik yang sama.

c. Membandingkan data dari dokumen tertulis dengan hasil wawancara mendalam. Peneliti membandingkan informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan dokumen-dokumen pendukung yang sesuai dengan topik.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data Menurut Sugiyono (2016:246) mengemukakan teknik analisis data merupakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

3.8.1 Data Reduction (Redaksi Data) Menurut Sugiyono (2016:247) data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal penting, lalu dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dibantu dengan

peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek – aspek tertentu.

### 3.8.2 Data Display (Penyajian Data) Setelah data direduksi, maka langkah

selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganiskan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.

### 3.8.3 Conclusion Drawing/ Verification. Langkah ke tiga dalam analisis data

kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Menurut Sugiyono (2016:253) Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang

sebelumnya belum pernah ada . temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang – remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual, atau intraktif, hipotesis atau teori.